

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aslinda (2023) *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan* : Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Afkhami, M., & Eisenberg, A. (2010) *Mengarah ke aksi* : Buku Panduan Partisipasi Politik Untuk Perempuan.
- H. Tachjan (2006) *Implementasi kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Bandung.
- Moleong, L.J. (2004) *Metodelogi Penelitian*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. (2005) *Analisis kebijakan publik* : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and development)*. Bandung.

B. Jurnal

- Agung, S., & Yuliwati, F. (n.d.). *Penelitian ini mengangkat topik tentang Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Kota Tasikmalaya . Kajian ini diilhami oleh kondisi di mana budaya politik patriarki yang melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia pada gilirannya telah menemp. 24.*
- Lestari, Y., Gamaputra, G., & Nuzula, F. (2021). Problematics of Affirmative Action Policy Implementation of Women's Representation Quota in Surabaya City Election. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 91–102. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1580>
- Listiyani, A. R., Elok, A., Maharani, P., Golkar, P., Surakarta, K., Golkar, P., Surakarta, K., Politik, P., Listiyani, A. R., Elok, A., & Maharani, P. (2021). *Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Parties As an Efforts To Improve Women ' S*. 5(1), 16–30.
- Patricia, C. O. S. (2021). *Pelaksanaan Affirmative action pasca mahkamah konstitusi no 22-25/PUU-VI/2008 Di KPU kota Parepare (Analisis Siyasa*

Dusturiyah). Nurmila Ramadhani, 2021. 3(2), 6.

Raqim, Lestari, & Handoyo. (2017). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 90–97.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20078>

Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 12(1), 41–47.

YOLANDA, H. (2019). *POLITIK DAN PEREMPUAN (Penerapan Affirmative action dalam Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019)*.

C. Undang-Undang

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 H tentang persamaan hak atau kedudukan setiap warga negara.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

D. Website

Profil DPR.RI. (<https://www.dpr.go.id/>)

Profil Badan Pusat Statistik RI (<https://www.bps.go.id/>)

Profil KPUD kota Tasikmalaya (<https://kota-tasikmalaya.kpu.go.id/>)

Profil Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya <https://tasikmalayakota.bps.go.id/>